

ABSTRAK

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam hal ini mampu menjadi kontributor utama dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik di Indonesia yang memang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pembangunan PLTU Karangandri ini sendiri memang pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik Jawa-Bali. Akan tetapi, adanya aktivitas dari PLTU Karangandri rupanya tidak luput dari dampak negatif yang turut mengikuti, terutama dalam sektor lingkungan yaitu dengan adanya pencemaran udara akibat debu yang berterbangan serta sumur warga yang tercemar dan mengalami kekeringan. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dalam kasus dampak lingkungan akibat aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Karangandri di Kabupaten Cilacap.

Penelitian ini menggunakan teori Ekologi Politik dengan pendekatan aktor menurut Bryant dan Bailey yang nantinya akan membahas mengenai bagaimana peran negara dalam mengatasi permasalahan lingkungan di Kabupaten Cilacap akibat dari aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Karangandri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik validitas data menggunakan triangulasi sumber dan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan *conclusion*.

Hasilnya dampak yang berikan PLTU Karangandri disebabkan karena adanya politisasi lingkungan, dimana hal tersebut dianalisis dengan ukuran, yakni adanya ukuran dimensi harian, episodik, dan sistematis. Dalam skala, ada skala lokal, nasional, dan global. Dalam kekuatan, kekuatan tersebut terdiri dari perencanaan dan kebijakan terkait lingkungan, kekuatan ekonomi yang mengontrol lingkungan atas bantuan lembaga multilateral, dan kekuatan sosial sebagai bentuk kontrol dari aktor akar rumput. Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cilacap adalah sebagai fasilitator antara masyarakat dengan pihak PLTU. Sebagai agen penengah ketika masyarakat merasa terganggu atas dampak yang ditimbulkan PLTU tersebut, dan hasilnya Pemerintah Kabupaten Cilacap sudah melakukan tugasnya, akan tetapi memang keterbatasan kewenangan membuat pengelolaan yang berdampak kepada lingkungan terbatas serta harus bekerjasama dengan unsur lain membuat penanganan terhadap keluhan masyarakat membutuhkan waktu yang cukup banyak. Kesimpulannya dampak yang ditimbulkan PLTU terbentuk akibat dari politisasi lingkungan yang menjadi sebab mengapa dampak yang ditimbulkan merugikan manusia dan lingkungan.

Kata kunci: Peran Pemerintah Daerah, PLTU, Dampak Lingkungan

ABSTRACT

Steam Power Plant (PLTU) in this case is able to become the main contributor in fulfilling the electricity needs in Indonesia which indeed continues to increase from year to year. The construction of the Karangkandri PLTU itself is basically intended to fulfill the electricity supply needs of Java-Bali. However, the activities of the Karangkandri PLTU apparently do not escape the negative impacts that follow, especially in the environmental sector, namely air pollution due to flying dust and polluted and dry wells of residents. This study then aims to determine the role of the Cilacap Regency Government in environmental management efforts in cases of environmental impacts due to the activities of the Karangkandri Steam Power Plant (PLTU) in Cilacap Regency.

This study uses the theory of Political Ecology with an actor approach according to Bryant and Bailey which will later discuss the role of the state in overcoming environmental problems in Cilacap Regency due to the activities of the Karangkandri Steam Power Plant (PLTU). The research method used in this study is a qualitative research method with a case study approach. The sampling used is the purposive sampling and snowball sampling techniques. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. While the data validity technique uses triangulation of sources and data analysis, namely data reduction, data presentation, and conclusion.

The results of the impact of the Karangkandri PLTU are due to the politicization of the environment, where it is analyzed by size, namely the existence of daily, episodic, and systematic dimensions. In scale, there are local, national, and global scales. In strength, the strength consists of environmental planning and policies, economic power that controls the environment with the help of multilateral institutions, and social power as a form of control from grassroots actors. In the implementation of environmental management carried out by the Cilacap Regency Government, it is a facilitator between the community and the PLTU. As a mediating agent when the community feels disturbed by the impact caused by the PLTU, and the result is that the Cilacap Regency Government has carried out its duties, but indeed the limited authority makes management that has an impact on the environment limited and must cooperate with other elements, making handling of community complaints take quite a lot of time. In conclusion, the impact caused by the PLTU is formed as a result of the politicization of the environment which is the reason why the impact caused is detrimental to humans and the environment.

Keywords: Role of Local Government, PLTU, Environmental Impact